

# RENJA 2024

## DINAS SOSIAL

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang Telp. (0285) 392320 Fax. 392320 Batang  
Email : [dinsoskabatang@gmail.com](mailto:dinsoskabatang@gmail.com) // Website: [dinsos.batangkab.go.id](http://dinsos.batangkab.go.id)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 selain memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Batang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023. Adapun keterkaitan hubungan hirarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut .



a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial yang menyangkut aspek :

- a.1. Kualitas pelayanan Dinas Sosial
- a.2. Organisasi dan Tata Laksana Dinas Sosial
- a.3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya
- a.4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial
- a.5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial
- a.6. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial
- a.7. Rancangan awal RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024
- a.8. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- a.9. Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial
- b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial  
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah :
  - b.1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial;
  - b.2. Mengidentifikasi variable /data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian LKPD
  - b.3. Mengidentifikasikan besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi Tahun 2023 - 2026.
  - b.4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial



Review hasil evaluasi mencakup :

- c.1. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- c.2. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- c.3. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisa implikasi dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial.

Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Rentra Dinas Sosial.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- d.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial ;
- d.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- d.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional , seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals);
- d.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan prima;
- d.5. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD , meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program atau kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

- e.1. Mengidentifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
  - e.2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dengan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
  - e.3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang di danai dengan APBD.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- f.1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan , terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Contoh usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat biasanya pemberdayaan masyarakat misalnya Karang Taruna.
- Dalam prosesnya pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam rapat pertemuan dengan para Tenaga Ahli Sekretariat Dewan.
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis
- Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam Pembangunan Daerah.

- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

- j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha diversifikasi, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, memperkuat gerakan revolusi mental, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar meningkatkan ketahanan bencana.

- k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial dilakukan setelah diverifikasi pada saat rancangan awal.

- l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah ; dan

Forum SKPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (bottom up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan desentralisasi. Tujuan dari Forum antara lain untuk menyelaraskan dan mempertajam program serta kegiatan.

- m. Penyesuaian dokumen rancangan renja Dinas Sosial dengan hasil pembahasan forum perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan forum perangkat daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



- 8) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023 dan rencana kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Batang yang telah disusun.
- b) Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang pada tahun sebelumnya.
- c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial Kabupaten Batang sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Batang.
- d) Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- e) Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Batang yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- f) Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan dan kegiatan Tahun 2023.
- g) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial Tahun 2024

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I   Pendahuluan

BAB II   Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022

BAB III  Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan

BAB IV  Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2022 - 2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2022 - 2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2022 - 2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke lima pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2022 – 2026 telah dapat diketahui.

Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

| No Kode                                | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s..d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
|  |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1                                      | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| <b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL</b> |   |   |  |  |  |   |                       |   |  |  |
| I                                      | <i>Program Rehabilitasi Sosial</i>  | <i>Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>  | 70   | 64   | 70   | 69  | 99                    | 70  | 68   | 97   |
| 1                                      | <i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i> | <i>Jumlah Penanganan dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i> | 70   | 66   | 70   | 68  | 97                    | 70  | 68   | 97   |
| 1,1                                    | Penyediaan Permakanan   | Jumlah PMKS penerima bantuan pangan   | 50   | 40   | 50   | 49  | 98                    | 50  | 46   | 93   |
| 1,2                                    | Penyediaan Sandang  | Jumlah PMKS penerima sandang  | 55   | 45   | 55   | 54  | 98                    | 55  | 51   | 93   |
| 1,3                                    | Penyediaan alat bantu   | Jumlah Penerima alat bantu bagi PMKS Penyandang Disabilitas   | 25   | 15   | 25   | 25  | 100                   | 25  | 22   | 87   |
| 1,4                                    | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | Jumlah PMKS yang mendapat fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | 60   | 54   | 60   | 60  | 100                   | 60  | 58   | 97   |



| No Kode   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s..d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|-----------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
|           |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| 1,5       | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar                | Jumlah PMKS yang mendapat layanan pendidikan dan kesehatan dasar   | 8  | 3  | 8  | 7   | 88                    | 8   | 6  | 75   |
| 1,6       | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                     | Jumlah PMKS yang terlayani pengaduan dan layanan datanya   | 13   | 6  | 13   | 12  | 92                    | 13  | 10   | 79   |
| 1,9       | Pemberian Layanan Rujukan  | Jumlah penerima layanan rujukan bagi PMKS  | 100  | 90   | 100  | 100   | 100                   | 100   | 97   | 97   |
| <b>II</b> | <b>Program Penanganan Bencana</b>  | <b>Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>   | <b>70</b>  | <b>60</b>  | <b>65</b>  | <b>63</b>                                     | <b>97</b>             | <b>70</b>   | <b>64</b>  | <b>92</b>                                    |
| <b>1</b>  | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial</b>   | <b>200</b>   | <b>180</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>                                    | <b>100</b>            | <b>200</b>  | <b>190</b>   | <b>95</b>                                    |
| 1,1       | Penyediaan Makanan   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan pangan   | 200  | 180  | 190  | 190   | 100                   | 200   | 190  | 95   |
| 1,2       | Penyediaan Sandang   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sandang  | 100  | 80   | 90   | 90  | 100                   | 100   | 90   | 90   |
| 1,4       | Penanganan Khusus bagi kelompok rentan                                   | Jumlah penanganan asistensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlantaran berat | 200  | 180  | 190  | 190   | 100                   | 200   | 190  | 95   |
| 1,5       | Pelayanan Dukungan Psikososial   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat layanan dukungan psikososial   | 55   | 45   | 50   | 50  | 100                   | 55  | 50   | 91   |

| No Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
|         |   |  |  |   | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1       | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| 2       | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten  | 1  | 1   | 1  | 1   | 100                   | 1   | 1  | 100  |
| 2,1     | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                          | Jumlah koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana  | 1  | 1   | 1  | 1   | 100                   | 1   | 1  | 100  |
| III     | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | <i>Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga</i> | 70   | 66  | 68   | 67  | 99                    | 70  | 68   | 97   |
| 1       | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar  | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial   | 70   | 100   | 65   | 65  | 100                   | 70  | 78   | 112  |
| 1,1     | Penjangkauan Anak-anak terlantar  | Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak terlantar  | 1.500  | 25  | 1.500  | 1.500   | 100                   | 1.500   | 1.008  | 67   |
| 2       | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Puskesmas yg didirikan/ difasilitasi  | 3  | -   | 1  | 1   | 100                   | 3   | 1  | 44   |
| 2,1     | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah data KPM  | 170.887  | 170.880   | 170.892  | 170.400                                       | 100                   | 170.887   | 170.722  | 100  |
| 2,2     | Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat  | Jumlah Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas  | 30   | 50  | 69   | 68  | 99                    | 30  | 49   | 164  |



| No Kode   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|-----------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
|           |  |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| 2,3       | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah KK yang mendapat bantuan BPNT  | 76.571   | 76.560  | 76.576   | 76.574  | 100                   | 76.571  | 76.568   | 100  |
| <b>IV</b> | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>   | <b>Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos</b>                     | <b>75</b>  | <b>65</b>   | <b>70</b>  | <b>70</b>                                     | <b>100</b>            | <b>75</b>   | <b>70</b>  | <b>93</b>                                    |
| <b>1</b>  | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Jumlah PSKS yang mengalami peningkatan kemampuan</b>                       | <b>75</b>  | <b>65</b>   | <b>70</b>  | <b>70</b>                                     | <b>100</b>            | <b>75</b>   | <b>70</b>  | <b>93</b>                                    |
| 1,1       | Peningkatan Kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota               | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya               | 252  | 246   | 248  | 245   | 99                    | 252   | 248  | 98   |
| 1,2       | Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota   | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya   | 15   | 15  | 15   | 15  | 100                   | 15  | 15   | 100  |
| 1,3       | Peningkatan Kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota    | Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang ditingkatkan jumlahnya       | 160.507  | 160.504   | 160.507  | 160.507                                       | 100                   | 160.507   | 160.506  | 100  |
| 1,4       | Peningkatan Kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten /Kota | Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan yang ditingkatkan kemampuannya | 494  | 490   | 492  | 491   | 100                   | 494   | 492  | 100  |
| <b>V</b>  | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>  | <b>Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>                     | <b>100</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>                                    | <b>100</b>            | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>                                   |

| No Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s..d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
|         |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1       | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| 1       | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                      | <b>Jumlah TMP yang mendapat pemeliharaan</b>   | 1  | 1  | 1  | 1   | 100                   | 1   | 1  | 100  |
| 1,1     | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah tenaga pemelihara Taman Makam Pahlawan Kabupaten  | 1  | 1  | 1  | 1   | 100                   | 1   | 1  | 100  |
| 1,2     | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                               | Jumlah tenaga pengamanan TMP Nasional  | 1  | 1  | 1  | 1   | 100                   | 1   | 1  | 100  |
| VI      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</b>                      | <b>Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai kompetensi yg dibutuhkan</b>  | 75   | 60   | 60   | 60  | 100                   | 75  | 65   | 87   |
| 1       | <b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>   | 7  | 7  | 7  | 7   | 100                   | 7   | 7  | 100  |
| 1,1     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7  | 7  | 7  | 7   | 100                   | 7   | 7  | 100  |
| 2       | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah laporan keuangan yang disusun</b>  | 18   | 18   | 18   | 18  | 100                   | 18  | 18   | 100  |
| 2,1     | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 25   | 25   | 25   | 25  | 100                   | 25  | 25   | 100  |



| No Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s..d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
|         |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1       | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| 2,2     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 7  | 7  | 7  | 7   | 100                   | 7   | 7  | 100  |
| 2,3     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18   | 18   | 18   | 18  | 100                   | 18  | 18   | 100  |
| 3       | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah</b>  | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>                                    | <b>100</b>            | <b>105</b>  | <b>105</b>   | <b>100</b>                                   |
| 3,1     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3  | 3  | 3  | 3   | 100                   | 3   | 3  | 100  |
| 3,2     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2  | 2  | 2  | 2   | 100                   | 2   | 2  | 100  |
| 3,3     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2  | 2  | 2  | 2   | 100                   | 2   | 2  | 100  |
| 3,4     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2  | 2  | 2  | 2   | 100                   | 2   | 2  | 100  |
| 3,5     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 2  | 2  | 2  | 2   | 100                   | 2   | 2  | 100  |

| No Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s..d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
|         |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| 3,6     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 5  | 5  | 5  | 5   | 100                   | 5   | 5  | 100  |
| 4       | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Jumlah barang milik daerah yang dibeli/ direhab</b>   | 1  | 1  | 1  | 1   | 100                   | 1   | 1  | 100  |
| 4,1     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5  | 5  | 5  | 5   | 100                   | 5   | 5  | 100  |
| 5       | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                     | 7  | 7  | 7  | 7   | 100                   | 7   | 7  | 100  |
| 5,1     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.570  | 3.570  | 3.570  | 3.570   | 100                   | 3.570   | 3.570  | 100  |
| 5,2     | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 4  | 4  | 4  | 4   | 100                   | 4   | 4  | 100  |
| 5,3     | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1  | 1  | 1  | 1   | 100                   | 1   | 1  | 100  |
| 6       | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Jumlah barang yang dipelihara</b>   | 1.313  | 1.313  | 1.313  | 1.313   | 100                   | 1.313   | 1.313  | 100  |



| No Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun (2020) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
|         |   |  |  |   | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)                   | Realisasi renja perangkat daerah tahun (2021) | Tingkat realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2022)               | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1       | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)/3   | 11=(10/4)*100                                |
| 6,1     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 18   | 18  | 18   | 18  | 100                   | 18  | 18   | 100  |
| 6,2     | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 23   | 23  | 23   | 23  | 100                   | 23  | 23   | 100  |
| 6,3     | Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 6  | 6   | 6  | 6   | 100                   | 6   | 6  | 100  |
| 6,4     | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12   | 12  | 12   | 12  | 100                   | 12  | 12   | 100  |

Batang, Juni 2023

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Batang,

  
**Ir. JOKO TETUKO, M.Si**  
NIP. 19630605 199203 1 015

Dari Tabel 2.2 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan di Rentra Dinas Sosial Tahun 2022 - 2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di Tahun 2021, maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dalam tabel seperti dibawah ini:

**Tabel 2.2.a**

Realisasi program /Kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan:

| No       | Program/Kegiatan   | Faktor Penyebab  | Implikasi     | Ket |
|----------|--|--|---------------|-----|
|          | <b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL</b>   |  |               |     |
| <b>I</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |               |     |
| <b>1</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |  |               |     |
| 1.1      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | sisa alokasi anggaran cetak  | sisa anggaran |     |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |               |     |
| 2.1      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | selisih pembulatan angka/nominal   | sisa anggaran |     |
| 2.2      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | terdapat alokasi anggaran belanja lembur dan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang tidak bisa di laporkan | sisa anggaran |     |
| 2.3      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                      | sisa alokasi anggaran cetak dan sisa selisih pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja non ASN                         | sisa anggaran |     |
| <b>3</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |               |     |
| 3.1      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | sisa alokasi anggaran tenaga ahli yang tidak bisa dialporkan   | sisa anggaran |     |
| 3.2      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | sisa nilai nominal kontrak pembelian peralatan komputer yang lebih kecil dari anggaran                                 | sisa anggaran |     |
| 3.3      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | sisa alokasi anggaran makan minum  | sisa anggaran |     |
| 3.5      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | selisih harga bahan bacaan   | sisa anggaran |     |
| 3.6      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Total pembiayaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jarak tempuh   | sisa anggaran |     |
| <b>4</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |               |     |
| 4.1      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | sisa nilai nominal kontrak pembelian Mebel yang lebih kecil dari anggaran  | sisa anggaran |     |
| <b>5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |               |     |
| 5.1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | sisa anggaran penyediaan benda pos yang udah sesusi kebutuhan  | sisa anggaran |     |
| 5.2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | sisa anggaran tagihan listrik, air dan telepon   | sisa anggaran |     |
| 5.3      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | sisa anggaran iuran BPJS Non ASN dan pembelian perabot kantor  | sisa anggaran |     |
| <b>6</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  |               |     |
| 6.1      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | sisa anggaran bahan bakar dan pelumas  | sisa anggaran |     |



| No         | Program/Kegiatan  | Faktor Penyebab  | Implikasi     | Ket |
|------------|---|--|---------------|-----|
| 6.3        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | sisa anggaran jasa arsitektur, pengawasan, dan pembangunan gedung kantor         | sisa anggaran |     |
| 6.4        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | sisa anggaran pembangunan gedung, pembelian alat rumah tangga, bahan dan pelumas | sisa anggaran |     |
| <b>II</b>  | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>  |  |               |     |
| <b>I</b>   | <b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>   |  |               |     |
| 1.1        | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT  | Jumlah Penerima Alat Bantu lebih sedikit dengan target yang direncanakan         | sisa anggaran |     |
| 1.2        | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT  | Total pembiayaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jarak tempuh                 | sisa anggaran |     |
| <b>2</b>   | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |               |     |
| 2.1        | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Total pembiayaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jarak tempuh                 | sisa anggaran |     |
| <b>III</b> | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>  |  |               |     |
| <b>1</b>   | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> |  |               |     |
| 1.1        | Penyediaan Permakanan   | Jumlah PMKS yg dilayani lebih sedikit dengan target yang direncanakan            | sisa anggaran |     |
| 1.3        | Penyediaan Alat Bantu   | Nilai kontrak penyediaan alat bantu lebih kecil daripada anggaran yang tersedia  | sisa anggaran |     |
| 1.4        | Pemberian Layanan Rujukan   | Total pembiayaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jarak tempuh                 | sisa anggaran |     |
| <b>IV</b>  | <b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>  |  |               |     |
| <b>1</b>   | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |               |     |
| 1.1        | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Total pembiayaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jarak tempuh                 | sisa anggaran |     |
| 1.2        | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Total pembiayaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jarak tempuh                 | sisa anggaran |     |
| <b>V</b>   | <b>Program Penanganan Bencana</b>   |  |               |     |
| <b>1</b>   | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>  |  |               |     |
| 1.1        | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana   | Pembiayaan honor kegiatan tenaga Tagana  | sisa anggaran |     |
| <b>VI</b>  | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>   |  |               |     |
| <b>1</b>   | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>  |  |               |     |
| 1.1        | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Total pembiayaan perjalanan dinas yang menyesuaikan jarak tempuh                 | sisa anggaran |     |
| 1.2        | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Pengurangan jumlah tanggungan pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja non ASN  | sisa anggaran |     |

**Tabel 2.2.b**

Realisasi kinerja kegiatan Tahun 2022 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

| No  | Program/Kegiatan  | Faktor Penyebab                          | Implikasi       | Ket |
|-----|---|--|-----------------|-----|
|     | URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL                                       |  |                 |     |
| I   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           |  |                 |     |
| 1   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |                 |     |
| 1.1 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Konsistensi perencanaan dan penganggaran | Target tercapai |     |
| 2   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |                 |     |
| 2.1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Konsistensi perencanaan dan penganggaran | Target tercapai |     |
| II  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                               |  |                 |     |
| 1   | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                      |  |                 |     |
| 1.1 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                      | Konsistensi perencanaan dan penganggaran | Target tercapai |     |
| 2   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota           |  |                 |     |
| 2.1 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                      | Konsistensi perencanaan dan penganggaran | Target tercapai |     |

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 - 2026, Dinas Sosial Kabupaten Batang telah memiliki tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas Sosial memiliki dua indikator kinerja sasaran dan empat indikator kinerja program, dengan rencana target capaian dari tahun 2017 - 2022, adalah seperti dalam table berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial Kab. Batang Prov. Jawa Tengah**

| No | Indikator  | Satuan | SPM /standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |          |          |          | Realisasi Capaian |          | Proyeksi |          | Catatan Analisis |
|----|--|--------|-----------------------|-----|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
|    |  |        |                       |     | Thn 2021                        | Thn 2022 | Thn 2023 | Thn 2024 | Thn 2021          | Thn 2022 | Thn 2023 | Thn 2024 |                  |
| 1  | 2  | 3      | 4                     | 5   | 6                               | 7        | 8        | 9        | 10                | 11       | 12       | 13       | 14               |
| 1  | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil | %      | 100                   | 90  | 70                              | 80       | 80       | 85       | 90                | 90       | 85       | 85       |                  |
| 2  | Rasio PSKS yang aktif dalam                                      | %      | 100                   | 90  | 65                              | 70       | 75       | 80       | 20                | 90,3     | 75       | 75       |                  |



| No | Indikator                                   | Satuan | SPM /standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |          |          |          | Realisasi Capaian |          | Proyeksi |          | Catatan Analisis |
|----|---|--------|-----------------------|-----|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
|    |   |        |                       |     | Thn 2021                        | Thn 2022 | Thn 2023 | Thn 2024 | Thn 2021          | Thn 2022 | Thn 2023 | Thn 2024 |                  |
| 1  | 2   | 3      | 4                     | 5   | 6                               | 7        | 8        | 9        | 10                | 11       | 12       | 13       | 14               |
|    | pembangunan Kesos                           |        |                       |     |                                 |          |          |          |                   |          |          |          |                  |
| 3  | Persentase santunan kematian yang diberikan | %      | 100                   | 100 | 100                             | 100      | 100      | 100      | 97,7              | 100      | 95       | 95       |                  |
| 4  | Persentase PMKS yang diberdayakan           | %      | 100                   | 0,2 | 4,35                            | 4,35     | 4,35     | 4,35     | 0,19              | 0,22     | 0,24     | 0,25     |                  |

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Program-program penanganan kemiskinan memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Sementara penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu, hal tersebut berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial sebagai pelaksana tugas dan fungsi di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung adanya komitmen dari mitra kerja dan lembaga sosial yang peduli dengan masalah sosial sehingga dapat berjalan kondusif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang baru maka masih banyak kelemahan, antara lain: SDM yang memiliki kompetensi masih kurang, tingginya angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sarana dan prasarana yang belum memadai, Cakupan bantuan Sosial bagi PMKS masih rendah, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan PMKS belum optimal.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang social. Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial meliputi: Tingginya angka kemiskinan, Belum optimalnya pemberdayaan PMKS. Belum maksimalnya peran PSKS, masih terdapat masyarakat yang memiliki jiwa miskin.

Namun ada beberapa peluang yang dapat dipergunakan untuk menghadapi tantangan yang ada antara lain: Adanya Undang-Undang

nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tersedianya dana dari berbagai sumber, Adanya koordinasi Lintas Sektor/Dinas terkait, Adanya jaringan kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat dan Lembaga (LSM/Organisasi Sosial), adanya bantuan social melalui program Program Keluarga Harapan (PKH), Adanya semangat keperintisan dan kesetiakawanan di masyarakat;

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diataranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022 - 2026, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sampai dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dilaksnakan masing-masing Perangkat Daerah. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Propinsi Jawa Tengah Kab. Batang**

**Nama Perangkat Daerah = Dinas Sosial**

| No  | Rancangan Awal RKPD   |        |  |                |                         | Hasil Analisa Kebutuhan   |        |  |                |                         | Catatan Penting                                  |
|-----|---|--------|--|----------------|-------------------------|---|--------|--|----------------|-------------------------|--|
|     | Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif          | Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan dana          |  |
| (1) | (2)   | (3)    | (4)  | (5)            | (6)                     | (7)   | (8)    | (9)  | (10)           | (11)                    | (12)   |
| I   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |        |  |                | <b>Rp3.157.907.795</b>  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |        |  |                | <b>Rp 2.936.583.817</b> |  |
|     | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Batang | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun  | 7              | Rp 5.098.500            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Batang | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun  | 7              | Rp 5.098.500            |  |
| a   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Batang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7              | Rp 5.098.500            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Batang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7              | Rp 5.098.500            |  |
|     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Batang | Jumlah laporan keuangan yang disusun   | 18             | <b>Rp 2.600.701.386</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Batang | Jumlah laporan keuangan yang disusun   | 18             | <b>Rp 2.273.891.108</b> |  |
| a   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Batang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 25             | Rp 2.416.730.386        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Batang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 25             | Rp 2.093.916.108        | Bertambah krn Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| b   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Batang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 7              | Rp 149.322.000          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Batang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 7              | Rp 145.326.000          | Berkurang krn Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| c   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | Batang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD                       | 18             | Rp 34.649.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD         | Batang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD                       | 18             | Rp 34.649.000           |  |
|     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Batang | Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah   | 105            | <b>Rp 142.253.950</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Batang | Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah   | 105            | <b>Rp 167.740.250</b>   |  |
| a   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Batang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3              | Rp 3.290.700            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Batang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3              | Rp 3.290.700            |  |
| b   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Batang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2              | Rp 51.277.250           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Batang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2              | Rp 51.277.250           |  |



| No        | Rancangan Awal RKPD  |               |  |                |                        | Hasil Analisa Kebutuhan  |               |  |                |                         | Catatan Penting                                  |
|-----------|--|---------------|--|----------------|------------------------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|--|
|           | Program/Kegiatan   | Lokasi        | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif         | Program/Kegiatan   | Lokasi        | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan dana          |  |
| (1)       | (2)  | (3)           | (4)  | (5)            | (6)                    | (7)  | (8)           | (9)  | (10)           | (11)                    | (12)   |
| c         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Batang        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2              | Rp 15.750.000          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Batang        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2              | Rp 56.050.000           | Bertambah krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| d         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | Batang        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 2              | Rp 7.720.000           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | Batang        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 2              | Rp 7.720.000            |  |
| e         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Batang        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                             | 2              | Rp 3.216.000           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Batang        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                             | 2              | Rp 3.216.000            |  |
| f         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Batang        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 5              | Rp 61.000.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Batang        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 5              | Rp 6.186.300            | Berkurang krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
|           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Batang</b> | <b>Jumlah barang milik daerah yang dibeli/ direhab</b>   | <b>1</b>       | <b>Rp 25.683.900</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Batang</b> | <b>Jumlah barang milik daerah yang dibeli/ direhab</b>   | <b>1</b>       | <b>Rp 105.683.900</b>   |  |
| a         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Batang        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 5              | Rp 25.683.900          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Batang        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 5              | Rp 05.683.900           | Bertambah krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
|           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Batang</b> | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                               | <b>7</b>       | <b>Rp 155.367.400</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Batang</b> | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                               | <b>7</b>       | <b>Rp 155.367.400</b>   |  |
| a         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Batang        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.570          | Rp 15.897.400          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Batang        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.570          | Rp 8.747.400            | Berkurang krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| b         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Batang        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 4              | Rp 66.550.000          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Batang        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 4              | Rp 73.700.000           | Bertambah krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| c         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Batang        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1              | Rp 72.920.000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Batang        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1              | Rp 72.920.000           |  |
|           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Batang</b> | <b>Jumlah barang yang dipelihara</b>   | <b>1.310</b>   | <b>Rp 228.802.659</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Batang</b> | <b>Jumlah barang yang dipelihara</b>   | <b>1.310</b>   | <b>Rp 228.802.659</b>   |  |
| a         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Batang        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 18             | Rp 92.245.000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Batang        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 18             | Rp 92.245.000           |  |
| b         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Batang        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 23             | Rp 4.300.000           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Batang        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 23             | Rp 4.300.000            |  |
| c         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banunan Lainnya  | Batang        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 6              | Rp 124.257.659         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banunan Lainnya  | Batang        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 6              | Rp 124.257.659          |  |
| d         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Batang        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9              | Rp 8.000.000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Batang        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9              | Rp 8.000.000            |  |
| <b>II</b> | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>   | <b>Batang</b> | <b>Terlaksananya Pemberdayaan terhadap PMKS</b>  | <b>75</b>      | <b>Rp3.341.715.000</b> | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>   | <b>Batang</b> | <b>Terlaksananya Pemberdayaan terhadap PMKS</b>  | <b>75</b>      | <b>Rp 2.327.985.000</b> |  |



| No  | Rancangan Awal RKPD  |        |  |                |                  | Hasil Analisa Kebutuhan  |        |  |                |                  | Catatan Penting                                  |
|-----|--|--------|--|----------------|------------------|--|--------|--|----------------|------------------|--|
|     | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif   | Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan dana   |  |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)  | (5)            | (6)              | (7)  | (8)    | (9)  | (10)           | (11)             | (12)   |
| 1   | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)   | Batang | Tercapainya Peningkatan Taraf Hidup  | 508            | Rp 3.034.375.000 | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)   | Batang | Tercapainya Peningkatan Taraf Hidup  | 508            | Rp 2.215.645.000 |  |
| a   | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT   | Batang | Jumlah PMKS yang terampil dan terlatih   | 36             | Rp 2.484.955.000 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT   | Batang | Jumlah PMKS yang terampil dan terlatih   | 36             | Rp .678.225.000  | Berkurang krn Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| b   | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT   | Batang | Jumlah pendamping KAT yang profesional, inovatif dan kompetitif (PKH)  | 472            | Rp 549.420.000   | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT   | Batang | Jumlah pendamping KAT yang profesional, inovatif dan kompetitif (PKH)  | 472            | Rp 537.420.000   | Bertambah krn Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
|     | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   | Batang | Meningkatnya pengembangan sumber kesejahteraan sosial daerah   | 111            | Rp 307.340.000   | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   | Batang | Meningkatnya pengembangan sumber kesejahteraan sosial daerah   | 111            | Rp 112.340.000   |  |
| a   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Batang | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya  | 15             | Rp 112.340.000   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Batang | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya  | 15             | Rp 112.340.000   |  |
| b   | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Batang | Jumlah Sumber kesejahteraan sosial keluarga yang ditingkatkan jumlahnya  | 160.507        | Rp 195.000.000   | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Batang | Jumlah Sumber kesejahteraan sosial keluarga yang ditingkatkan jumlahnya  | 160.507        | -                | Di Nol kan krn Anggaran Perubahan(DPA Perubahan) |
| III | Program Rehabilitasi Sosial  | Batang | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  | 67             | Rp 122.595.000   | Program Rehabilitasi Sosial  | Batang | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  | 67             | Rp 106.545.000   |  |
| 1   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Batang | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 68             | Rp 122.595.000   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Batang | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 68             | Rp 106.545.000   |  |
| a   | Penyediaan Permakanan  | Batang | Jumlah PMKS penerima bantuan pangan  | 45             | Rp 1.245.000     | Penyediaan Permakanan  | Batang | Jumlah PMKS penerima bantuan pangan  | 45             | Rp 1.245.000     |  |
| b   | Penyediaan Alat Bantu  | Batang | Jumlah Penerima alat bantu bagi PMKS Penyandang Disabilitas  | 20             | Rp 72.550.000    | Penyediaan Alat Bantu  | Batang | Jumlah Penerima alat bantu bagi PMKS Penyandang Disabilitas  | 20             | Rp 72.550.000    |  |
| c   | Penyediaan Sandang   | Batang | Jumlah PMKS penerima sandang   | 50             | Rp 150.000       | Penyediaan Sandang   | Batang | Jumlah PMKS penerima sandang   | 50             | -                | Di Nol kan krn Anggaran Perubahan(DPA Perubahan) |
| d   | Pemberian Layanan Rujukan  | Batang | Jumlah penerima layanan rujukan bagi PMKS  | 95             | Rp 48.650.000    | Pemberian Layanan Rujukan  | Batang | Jumlah penerima layanan rujukan bagi PMKS  | 95             | Rp 32.750.000    | Berkurang krn Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| IV  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Batang | Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga          | 68             | Rp1.589.095.000  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Batang | Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga          | 68             | Rp 1.723.755.000 |  |
| 1   | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar   | Batang | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial   | 65             | Rp 1.500.000.000 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar   | Batang | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial   | 65             | Rp 1.500.000.000 |  |



| No        | Rancangan Awal RKPD  |               |   |                |                         | Hasil Analisa Kebutuhan  |               |   |                |                         | Catatan Penting                                  |
|-----------|--|---------------|---|----------------|-------------------------|--|---------------|---|----------------|-------------------------|--|
|           | Program/Kegiatan   | Lokasi        | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif          | Program/Kegiatan   | Lokasi        | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan dana          |  |
| (1)       | (2)  | (3)           | (4)   | (5)            | (6)                     | (7)  | (8)           | (9)   | (10)           | (11)                    | (12)   |
| a         | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar   | Batang        | Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak terlantar   | 1.500          | Rp 1.500.000.000        | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar   | Batang        | Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak terlantar   | 1.500          | Rp 1.500.000.000        |  |
|           | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>Batang</b> | <b>Jumlah Puskesmas yg didirikan/ difasilitasi</b>  | <b>1</b>       | <b>Rp 89.095.000</b>    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>Batang</b> | <b>Jumlah Puskesmas yg didirikan/ difasilitasi</b>  | <b>1</b>       | <b>Rp 223.755.000</b>   |  |
| a         | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Batang        | Jumlah data KPM   | 170.892        | Rp 89.095.000           | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Batang        | Jumlah data KPM   | 170.892        | Rp 48.755.000           | Bertambah krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| b         | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Batang        | Jumlah KK yang mendapat bantuan BPNT  | 76.576         | -                       | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Batang        | Jumlah KK yang mendapat bantuan BPNT  | 76.576         | Rp 35.000.000           | Bertambah krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| c         | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Batang        | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 10             | -                       | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Batang        | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 10             | Rp 140.000.000          | Bertambah krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| <b>V</b>  | <b>Program Penanganan Bencana</b>  | <b>Batang</b> | <b>Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>  | <b>65</b>      | <b>Rp 72.900.000</b>    | <b>Program Penanganan Bencana</b>  | <b>Batang</b> | <b>Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>  | <b>65</b>      | <b>Rp 65.400.000</b>    |  |
| <b>1</b>  | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | <b>Batang</b> | <b>Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>                           | <b>1</b>       | <b>Rp 72.900.000</b>    | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | <b>Batang</b> | <b>Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>                           | <b>1</b>       | <b>Rp 65.400.000</b>    |  |
| a         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                | Batang        | Jumlah koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana   | 1              | Rp 72.900.000           | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                | Batang        | Jumlah koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana   | 1              | Rp 65.400.000           | Berkurang krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| <b>VI</b> | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>  | <b>Batang</b> | <b>Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>   | <b>100</b>     | <b>Rp 76.259.100</b>    | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>  | <b>Batang</b> | <b>Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>   | <b>100</b>     | <b>Rp 71.721.600</b>    |  |
| <b>1</b>  | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             | <b>Batang</b> | <b>Jumlah TMP yang mendapat pemeliharaan</b>  | <b>1</b>       | <b>Rp 76.259.100</b>    | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             | <b>Batang</b> | <b>Jumlah TMP yang mendapat pemeliharaan</b>  | <b>1</b>       | <b>Rp 71.721.600</b>    |  |
| a         | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                    | Batang        | Jumlah tenaga pemelihara Taman Makam Pahlawan Kabupaten   | 1              | Rp 56.039.100           | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                    | Batang        | Jumlah tenaga pemelihara Taman Makam Pahlawan Kabupaten   | 1              | Rp 51.501.600           | Berkurang krm Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) |
| b         | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                      | Batang        | Jumlah tenaga pengamanan TMP Nasional   | 1              | Rp 20.220.000           | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                      | Batang        | Jumlah tenaga pengamanan TMP Nasional   | 1              | Rp 20.220.000           |  |
|           | <b>Total</b>   |               |   |                | <b>Rp 8.360.471.895</b> | <b>Total</b>   |               |   |                | <b>Rp 7.231.990.417</b> |  |

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Batang untuk Tahun 2023 terdapat usulan dari masyarakat disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Batang**

| No | Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Besaran / Volume | Catatan                   |
|----|---|--------|---|------------------|---------------------------|
| 1  | Program Pemberdayaan Sosial   |        | Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos              |                  |                           |
| a  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota            |        | Jumlah PSKS yang mengalami peningkatan kemampuan                |                  |                           |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Batang | Jumlah pekerja sosial masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya | 256 orang        | Pelatihan peningkatan PSM |

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan;
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu;
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 bahwa OPD Dinas Sosial mempunyai Indikator Tujuan yaitu “Meningkatkan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial” dengan Indikator sasarannya yaitu Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar,perlindungan,jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial, Prosentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos, dan Nilai SAKIP Dinas Sosial.

Tujuan dan sasaran urusan Dinas Sosial Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran DINAS SOSIAL**  
**Kabupaten Batang Tahun 2024**

| No | Tujuan   | Sasaran  | Indikator   |
|----|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| 1  | Meningkatkan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial | Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS                             | Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar,perlindungan,jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial |
|    |  | Meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Prosentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos  |
|    |  | Meningkatnya kinerja dan akuntabiitas Dinas Sosial   | Nilai SAKIP Dinas Sosial  |

**3.2 Program dan Kegiatan**

Dinas Sosial Kabupaten Batang berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2023 merupakan perwujudan dalam usaha untuk mendukung RPD Kabupaten Batang yaitu untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) Dinas Sosial menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan penanggulangan masalah kemiskinan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2023, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, yang telah termuat di renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, menjadi 7 (tujuh) program, yaitu:(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Pemberdayaan Sosial, (3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (4) Program Rehabilitasi Sosial, (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial , (6) Program Penanganan Bencana, (7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program pemberdayaan sosial berfokus pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator terlaksannya Meningkatnya Pengembangan potensi sumber kesejahteraan Sosial dengan indikator Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan berfokus pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan indicator persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan.

Program Rehabilitasi Sosial diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Dengan indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berfokus pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan social bagi anak terlantar dalam usia 5-18 tahun bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan untuk kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota guna pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program penanganan bencana berfokus pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pengelolaan berfokus pada kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan dengan indicator Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

Rencana program dan kegiatan DINAS SOSIAL Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

**TABEL 3.2**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL KAB. BATANG PROV. JATENG**

| Kode                | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana ) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                               |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |   |  | Lokasi                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)                 | (2)   | (3)  | (4)                                 | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                          |
| <b>1.06.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA</b>                      | <b>Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai kompetensi yg dibutuhkan</b>  |                                     | <b>75</b>              | <b>Rp3.477.652.356</b>        |             |                 | <b>85</b>                         | <b>Rp2.593.478.</b>           |
| <b>1.06.01.2.01</b> | <b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>   |                                     | <b>7</b>               | <b>Rp 5.098.500</b>           |             |                 | <b>7</b>                          | <b>Rp 8.091.</b>              |
| 1.06.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Batang                              | 7                      | Rp 5.098.500                  | DAU         |                 | 7                                 | Rp 8.091.                     |
| <b>1.06.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah laporan keuangan yang disusun</b>  |                                     | <b>18</b>              | <b>Rp 2.728.385.076</b>       |             |                 | <b>18</b>                         | <b>Rp 2.011.061.</b>          |
| 1.06.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Batang                              | 25                     | Rp 2.490.815.576              | DAU         |                 | 25                                | Rp 1.822.491.                 |
| 1.06.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Batang                              | 7                      | Rp 227.671.000                | DAU         |                 | 7                                 | Rp 177.671.                   |
| 1.06.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Batang                              | 18                     | Rp 9.898.500                  | DAU         |                 | 18                                | Rp 10.898.                    |
| <b>1.06.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah</b>  |                                     | <b>105</b>             | <b>Rp 235.186.310</b>         |             |                 | <b>105</b>                        | <b>Rp 239.872.</b>            |
| 1.06.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Batang                              | 3                      | Rp 5.819.500                  | DAU         |                 | 3                                 | Rp 6.019.                     |
| 1.06.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Batang                              | 2                      | Rp 78.961.560                 | DAU         |                 | 2                                 | Rp 79.961.                    |
| 1.06.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Batang                              | 2                      | Rp 38.195.000                 | DAU         |                 | 2                                 | Rp 39.195.                    |



| Kode                | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana ) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                               |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |   |  | Lokasi                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1.06.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Batang                              | 2                      | Rp 8.863.500                  | DAU         |                 | 2                                 | Rp 9.863.500                  |
| 1.06.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             | Batang                              | 2                      | Rp 3.226.000                  | DAU         |                 | 2                                 | Rp 3.712.000                  |
| 1.06.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Batang                              | 5                      | Rp 100.120.750                | DAU         |                 | 5                                 | Rp 101.120.750                |
| <b>1.06.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Jumlah barang milik daerah yang dibeli/direhab</b>  |                                     | <b>1</b>               | <b>Rp 16.485.920</b>          |             |                 | <b>2</b>                          | <b>Rp 16.985.920</b>          |
| 1.06.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Batang                              | 5                      | Rp 16.485.920                 | DAU         |                 | 4                                 | Rp 16.985.920                 |
| <b>1.06.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                               |                                     | <b>7</b>               | <b>Rp 174.937.400</b>         |             |                 | <b>7</b>                          | <b>Rp 176.937.400</b>         |
| 1.06.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Batang                              | 3.570                  | Rp 8.747.400                  | DAU         |                 | 3.570                             | Rp 8.747.400                  |
| 1.06.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Batang                              | 4                      | Rp 73.150.000                 | DAU         |                 | 4                                 | Rp 74.150.000                 |
| 1.06.01.2.08.04     | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Batang                              | 1                      | Rp 93.040.000                 | DAU         |                 | 1                                 | Rp 94.040.000                 |
| <b>1.06.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Jumlah barang yang dipelihara</b>   |                                     | <b>1.313</b>           | <b>Rp 317.559.150</b>         |             |                 | <b>1.315</b>                      | <b>Rp 140.523.150</b>         |
| 1.06.01.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Batang                              | 18                     | Rp 89.025.150                 | DAU         |                 | 18                                | Rp 97.989.150                 |
| 1.06.01.2.09.06     | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Batang                              | 23                     | Rp 15.090.000                 | DAU         |                 | 23                                | Rp 17.090.000                 |
| 1.06.01.2.09.09     | Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Batang                              | 6                      | Rp 200.000.000                | DAU         |                 | 6                                 | Rp 10.000.000                 |
| 1.06.01.2.09.11     | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Batang                              | 12                     | Rp 13.444.000                 | DAU         |                 | 12                                | Rp 15.444.000                 |

| Kode                | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana ) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                               |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |   |   | Lokasi                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <b>1.06.02</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos</b>   |                                     | <b>75</b>              | <b>Rp 365.560.000</b>         |             |                 | <b>80</b>                         | <b>Rp 551.560</b>             |
| <b>1.06.02.03</b>   | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah PSKS yang mengalami peningkatan kemampuan</b>   |                                     | <b>75</b>              | <b>Rp 365.560.000</b>         |             |                 | <b>80</b>                         | <b>Rp 551.560</b>             |
| 1.06.02.03.01       | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya   | Batang                              | 252                    |                               |             |                 | 256                               | Rp 5.000                      |
| 1.06.02.03.02       | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya   | Batang                              | 15                     | Rp 18.050.000                 | DAU         |                 | 15                                | Rp 190.050                    |
| 1.06.02.03.03       | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang ditingkatkan jumlahnya   | Batang                              | 160.510                | Rp 339.500.000                | DAU         |                 | 160.513                           | Rp 341.500                    |
| 1.06.02.03.04       | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya  | Batang                              | 494                    | Rp 8.010.000                  | DAU         |                 | 496                               | Rp 10.010                     |
| 1.06.02.03.05       | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)   | Jumlah sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang ditingkatkan kemampuannya   | Batang                              | 30                     | Rp -                          |             |                 | 33                                | Rp 5.000                      |
|                     |   |   |                                     |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| <b>1.06.04</b>      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>  |                                     | <b>70</b>              | <b>Rp 175.000.550</b>         |             |                 | <b>73</b>                         | <b>Rp 191.500</b>             |
| <b>1.06.04.2.01</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>Jumlah Penanganan dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> |                                     | <b>70</b>              | <b>Rp 175.000.550</b>         |             |                 | <b>72</b>                         | <b>Rp 191.500</b>             |
| 1.06.04.2.01.01     | Penyediaan Permakanan   | Jumlah PMKS penerima bantuan pangan   | Batang                              | 50                     | Rp 13.500.000                 | DAU         |                 | 55                                | Rp 15.500                     |
| 1.06.04.2.01.02     | Penyediaan Sandang  | Jumlah PMKS penerima sandang  | Batang                              | 55                     | Rp 7.800.000                  | DAU         |                 | 60                                | Rp 9.800                      |

| Kode                | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana ) |                        |                               |               | Catatan Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                               |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |  |  | Lokasi                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |  | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1.06.04.2.01.03     | Penyediaan alat bantu  | Jumlah Penerima alat bantu bagi PMKS Penyandang Disabilitas  | Batang                              | 25                     | Rp 75.000.000                 | DAU           |  | 30                                | Rp 83.500.000                 |
| 1.06.04.2.01.07     | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah PMKS yang mendapat fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                 | Batang                              | 60                     | Rp 1.137.050                  | DAU           |  | 63                                | Rp 1.637.050                  |
| 1.06.04.2.01.08     | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar  | Jumlah PMKS yang mendapat layanan pendidikan dan kesehatan dasar   | Batang                              | 8                      | Rp 23.214.250                 | DAU           |  | 11                                | Rp 24.214.250                 |
| 1.06.04.2.01.09     | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan   | Jumlah PMKS yang terlayani pengaduan dan layanan datanya   | Batang                              | 13                     | Rp 939.250                    | DAU           |  | 16                                | Rp 1.439.250                  |
| 1.06.04.2.01.12     | Pemberian Layanan Rujukan  | Jumlah penerima layanan rujukan bagi PMKS  | Batang                              | 100                    | Rp 53.410.000                 | DAU           |  | 105                               | Rp 55.410.000                 |
| <b>1.06.05</b>      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | <b>Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga</b> |                                     | <b>70</b>              | <b>Rp1.969.268.800</b>        |               |  | <b>72</b>                         | <b>Rp5.097.422.</b>           |
| <b>1.06.05.2.01</b> | <b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>  | <b>Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>  |                                     | <b>70</b>              | <b>Rp 1.650.000.000</b>       |               |  | <b>71</b>                         | <b>Rp 1.652.000.000</b>       |
| 1.06.05.2.01.01     | Penjangkauan Anak-anak terlantar   | Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak terlantar  | Batang                              | 1.500                  | Rp 1.650.000.000              | DAU           |  | 1.510                             | Rp 1.652.000.000              |
| <b>1.06.05.2.02</b> | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Jumlah Puskesmas yg didirikan/ difasilitasi</b>   |                                     | <b>3</b>               | <b>Rp 319.268.800</b>         |               |  | <b>7</b>                          | <b>Rp 3.445.422</b>           |
| 1.06.05.2.02.01     | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah data KPM  | Batang                              | 170.887                | Rp 128.769.000                | DAU           |  | 170.882                           | Rp 130.769.000                |
| 1.06.05.2.02.02     | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah KK yang mendapat bantuan BPNT   | Batang                              | 76.571                 | Rp 90.404.800                 | DAU           |  | 76.566                            | Rp 95.404.800                 |
| 1.06.05.2.02.03     | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Batang                              | 2.039                  | Rp 3.117.153.988              | APBD Propinsi | Dapat pelimpahan anggaran DBHCHT( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dari setda | 2.039                             | Rp 2.000.000.000              |
| 1.06.05.2.02.04     | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | Jumlah Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas  | Batang                              | 30                     | Rp 100.095.000                | DAU           |  | 40                                | Rp 102.095.000                |



| Kode                | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana ) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                               |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |  |  | Lokasi                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|                     |  |  |                                     |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| <b>1.06.06</b>      | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>   |                                     | <b>70</b>              | <b>Rp 676.188.000</b>         |             |                 | <b>75</b>                         | <b>Rp 684.188.000</b>         |
| <b>1.06.06.2.01</b> | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial</b>   |                                     | <b>200</b>             | <b>Rp 644.984.000</b>         |             |                 | <b>210</b>                        | <b>Rp 651.984.000</b>         |
| 1.06.06.2.01.01     | Penyediaan Makanan   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan pangan   | Batang                              | 200                    | Rp 80.000.000                 | DAU         |                 | 210                               | Rp 82.000.000                 |
| 1.06.06.2.01.02     | Penyediaan Sandang   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sandang  | Batang                              | 100                    | Rp 3.000.000                  | DAU         |                 | 110                               | Rp 5.000.000                  |
| 1.06.06.2.01.04     | Penanganan Khusus bagi kelompok rentan   | Jumlah penanganan asistensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlambatan berat | Batang                              | 200                    | Rp 540.000.000                | DAU         |                 | 210                               | Rp 543.000.000                |
| 1.06.06.2.01.05     | Pelayanan Dukungan Psikososial   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat layanan dukungan psikososial   | Batang                              | 55                     | Rp 21.984.000                 | DAU         |                 | 60                                | Rp 21.984.000                 |
| <b>1.06.06.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</b>                                 |                                     | <b>1</b>               | <b>Rp 31.204.000</b>          |             |                 | <b>1</b>                          | <b>Rp 32.204.000</b>          |
| 1.06.06.2.02.01     | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                 | Jumlah koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana  | Batang                              | 1                      | Rp 31.204.000                 | DAU         |                 | 1                                 | Rp 32.204.000                 |
|                     |  |  |                                     |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| <b>1.06.07</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>  | <b>Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>  |                                     | <b>100</b>             | <b>Rp 125.719.999</b>         |             |                 | <b>100</b>                        | <b>Rp 127.719.999</b>         |
| <b>1.06.07.2.01</b> | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             | <b>Jumlah TMP yang mendapat pemeliharaan</b>   |                                     | <b>1</b>               | <b>Rp 125.719.999</b>         |             |                 | <b>1</b>                          | <b>Rp 127.719.999</b>         |
| 1.06.07.2.01.02     | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                    | Jumlah tenaga pemelihara Taman Makam Pahlawan Kabupaten  | Batang                              | 1                      | Rp 106.735.999                | DAU         |                 | 1                                 | Rp 108.735.999                |
| 1.06.07.2.01.03     | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                      | Jumlah tenaga pengamanan TMP Nasional  | Batang                              | 1                      | Rp 18.984.000                 | DAU         |                 | 1                                 | Rp 18.984.000                 |
|                     |  |  |                                     |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
| <b>1.06.03</b>      | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>                        | <b>Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan</b>  |                                     | <b>30</b>              | <b>Rp 3.000.000</b>           |             |                 | <b>35</b>                         | <b>Rp 3.000.000</b>           |

| Kode            | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana ) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                               |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |  |  | Lokasi                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1.06.03.2.01    | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal | Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal |                                     | 4                      | Rp -                          |             |                 | 6                                 | Rp 3.000                      |
| 1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah   | Jumlah warga negara migran yang mendapatkan fasilitasi   | Batang                              | 4                      | Rp -                          | DAU         |                 | 6                                 | Rp 3.000                      |
|                 | <b>Total Pagu</b>  |  |                                     |                        | <b>Rp 6.789.389.705</b>       |             |                 |                                   | <b>Rp 9.248.868</b>           |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4. 1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Batang**

| Kode                | Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana KerjaTahun 2023 |                        |                               |             | Catatan Penting |
|---------------------|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
|                     |   |  | Lokasi                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |
| (1)                 | (2)   | (3)  | (4)                     | (5)                    | (6)                           | "(7)        | (8)             |
| <b>1.06</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |  |                         |                        |                               |             |                 |
| <b>1.06.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA</b>                      | <i>Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai kompetensi yg dibutuhkan</i>  |                         | <b>85</b>              | <b>Rp 2.593.478.379</b>       |             |                 |
| <b>1.06.01.2.01</b> | <b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>   |                         | <b>7</b>               | <b>Rp 8.098.500</b>           |             |                 |
| 1.06.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Batang                  | 7                      | Rp 8.098.500                  | DAU         |                 |
| <b>1.06.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah laporan keuangan yang disusun</b>  |                         | <b>18</b>              | <b>Rp 2.011.061.059</b>       |             |                 |
| 1.06.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Batang                  | 25                     | Rp 1.822.491.559              | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Batang                  | 7                      | Rp 177.671.000                | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Batang                  | 18                     | Rp 10.898.500                 | DAU         |                 |
| <b>1.06.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah laporan penanganan laporan administrasi umum perangkat daerah</b>  |                         | <b>105</b>             | <b>Rp 239.872.310</b>         |             |                 |



| Kode                | Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                               |             | Catatan Penting |
|---------------------|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
|                     |  |  | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |
| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)                      | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             |
| 1.06.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | Batang                   | 3                      | Rp 6.019.500                  | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | Batang                   | 2                      | Rp 79.961.560                 | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Batang                   | 2                      | Rp 39.195.000                 | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | Batang                   | 2                      | Rp 9.863.500                  | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | Batang                   | 2                      | Rp 3.712.000                  | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Batang                   | 5                      | Rp 101.120.750                | DAU         |                 |
| <b>1.06.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>Jumlah barang milik daerah yang dibeli/direhab</b>  |                          | <b>2</b>               | <b>Rp 16.985.920</b>          |             |                 |
| 1.06.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Batang                   | 4                      | Rp 16.985.920                 | DAU         |                 |
| <b>1.06.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                  | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                     |                          | <b>7</b>               | <b>Rp 176.937.400</b>         |             |                 |
| 1.06.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Batang                   | 3.570                  | Rp 8.747.400                  | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | Batang                   | 4                      | Rp 74.150.000                 | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.08.04     | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | Batang                   | 1                      | Rp 94.040.000                 | DAU         |                 |
| <b>1.06.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah barang yang dipelihara</b>   |                          | <b>1.315</b>           | <b>Rp 140.523.190</b>         |             |                 |

| Kode              | Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                               |             | Catatan Penting |
|-------------------|---|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
|                   |   |  | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)                      | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             |
| 1.06.01.2.09.01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Batang                   | 18                     | Rp 97.989.190                 | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.09.06   | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Batang                   | 23                     | Rp 17.090.000                 | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.09.09   | Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Batang                   | 6                      | Rp 10.000.000                 | DAU         |                 |
| 1.06.01.2.09.11   | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Batang                   | 12                     | Rp 15.444.000                 | DAU         |                 |
|                   |   |  |                          |                        |                               |             |                 |
| <b>1.06.02</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos</b>  |                          | <b>80</b>              | <b>Rp 551.560.000</b>         |             |                 |
| <b>1.06.02.03</b> | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>Jumlah PSKS yang mengalami peningkatan kemampuan</b>  |                          | <b>80</b>              | <b>Rp 551.560.000</b>         |             |                 |
| 1.06.02.03.01     | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya  | Batang                   | 256                    | Rp 5.000.000                  |             |                 |
| 1.06.02.03.02     | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya                              | Batang                   | 15                     | Rp 190.050.000                | DAU         |                 |
| 1.06.02.03.03     | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang ditingkatkan jumlahnya                                  | Batang                   | 160.513                | Rp 341.500.000                | DAU         |                 |
| 1.06.02.03.04     | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota          | Jumlah sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya                 | Batang                   | 496                    | Rp 10.010.000                 | DAU         |                 |

| Kode                | Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Rencana KerjaTahun 2023 |                        |                               |             | Catatan Penting |
|---------------------|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
|                     |   |   | Lokasi                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |
| (1)                 | (2)   | (3)   | (4)                     | (5)                    | (6)                           | "(7)        | (8)             |
| 1.06.02.03.05       | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)   | Jumlah sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang ditingkatkan kemampuannya   | Batang                  | 33                     | Rp 5.000.000                  |             |                 |
| <b>1.06.04</b>      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>  |                         | <b>73</b>              | <b>Rp 191.500.550</b>         |             |                 |
| <b>1.06.04.2.01</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>Jumlah Penanganan dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> |                         | <b>72</b>              | <b>Rp 191.500.550</b>         |             |                 |
| 1.06.04.2.01.01     | Penyediaan Permakanan   | Jumlah PMKS penerima bantuan pangan   | Batang                  | 55                     | Rp 15.500.000                 | DAU         |                 |
| 1.06.04.2.01.02     | Penyediaan Sandang  | Jumlah PMKS penerima sandang  | Batang                  | 60                     | Rp 9.800.000                  | DAU         |                 |
| 1.06.04.2.01.03     | Penyediaan alat bantu   | Jumlah Penerima alat bantu bagi PMKS Penyandang Disabilitas   | Batang                  | 30                     | Rp 83.500.000                 | DAU         |                 |
| 1.06.04.2.01.07     | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | Jumlah PMKS yang mendapat fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | Batang                  | 63                     | Rp 1.637.050                  | DAU         |                 |
| 1.06.04.2.01.08     | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar   | Jumlah PMKS yang mendapat layanan pendidikan dan kesehatan dasar  | Batang                  | 11                     | Rp 24.214.250                 | DAU         |                 |
| 1.06.04.2.01.09     | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | Jumlah PMKS yang terlayani pengaduan dan layanan datanya  | Batang                  | 16                     | Rp 1.439.250                  | DAU         |                 |
| 1.06.04.2.01.12     | Pemberian Layanan Rujukan   | Jumlah penerima layanan rujukan bagi PMKS   | Batang                  | 105                    | Rp 55.410.000                 | DAU         |                 |
| <b>1.06.05</b>      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga</b>            |                         | <b>72</b>              | <b>Rp 5.097.422.838</b>       |             |                 |



| Kode                | Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                               |             | Catatan Penting |
|---------------------|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
|                     |  |  | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |
| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)                      | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             |
| <b>1.06.05.2.01</b> | <b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>                                  | <b>Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>  |                          | <b>71</b>              | <b>Rp 1.652.000.050</b>       |             |                 |
| 1.06.05.2.01.01     | Penjangkauan Anak-anak terlantar   | Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak terlantar  | Batang                   | 1.510                  | Rp 1.652.000.050              | DAU         |                 |
| <b>1.06.05.2.02</b> | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>       | <b>Jumlah Puskesmas yg didirikan/ difasilitasi</b>   |                          | <b>7</b>               | <b>Rp 3.445.422.788</b>       |             |                 |
| 1.06.05.2.02.01     | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah data KPM  | Batang                   | 170.882                | Rp 130.769.000                | DAU         |                 |
| 1.06.05.2.02.02     | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah KK yang mendapat bantuan BPNT   | Batang                   | 76.566                 | Rp 95.404.800                 | DAU         |                 |
| 1.06.05.2.02.03     | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                         | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Batang                   | 2.039                  | Rp 2.000.000.000              | APBD Prov   |                 |
| 1.06.05.2.02.04     | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                       | Jumlah Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas  | Batang                   | 40                     | Rp 102.095.000                | DAU         |                 |
|                     |  |  |                          |                        |                               |             |                 |
| <b>1.06.06</b>      | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>   |                          | <b>75</b>              | <b>Rp 684.188.000</b>         |             |                 |
| <b>1.06.06.2.01</b> | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial</b>   |                          | <b>210</b>             | <b>Rp 651.984.000</b>         |             |                 |
| 1.06.06.2.01.01     | Penyediaan Makanan   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan pangan   | Batang                   | 210                    | Rp 82.000.000                 | DAU         |                 |
| 1.06.06.2.01.02     | Penyediaan Sandang   | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sandang  | Batang                   | 110                    | Rp 5.000.000                  | DAU         |                 |
| 1.06.06.2.01.04     | Penanganan Khusus bagi kelompok rentan                                   | Jumlah penanganan asistensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlantaran berat | Batang                   | 210                    | Rp 543.000.000                | DAU         |                 |

| Kode                | Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Rencana KerjaTahun 2023 |                        |                               |             | Catatan Penting |
|---------------------|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
|                     |   |   | Lokasi                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |
| (1)                 | (2)   | (3)   | (4)                     | (5)                    | (6)                           | "(7)        | (8)             |
| 1.06.06.2.01.05     | Pelayanan Dukungan Psikososial  | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat layanan dukungan psikososial  | Batang                  | 60                     | Rp 21.984.000                 | DAU         |                 |
| <b>1.06.06.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</b>  |                         | <b>1</b>               | <b>Rp 32.204.000</b>          |             |                 |
| 1.06.06.2.02.01     | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana  | Jumlah koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana   | Batang                  | 1                      | Rp 32.204.000                 | DAU         |                 |
|                     |   |   |                         |                        |                               |             |                 |
| <b>1.06.07</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>   | <b>Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>   |                         | <b>100</b>             | <b>Rp 127.719.000</b>         |             |                 |
| <b>1.06.07.2.01</b> | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah TMP yang mendapat pemeliharaan</b>  |                         | <b>1</b>               | <b>Rp 127.719.000</b>         |             |                 |
| 1.06.07.2.01.02     | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Jumlah tenaga pemelihara Taman Makam Pahlawan Kabupaten   | Batang                  | 1                      | Rp 108.735.000                | DAU         |                 |
| 1.06.07.2.01.03     | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Jumlah tenaga pengamanan TMP Nasional   | Batang                  | 1                      | Rp 18.984.000                 | DAU         |                 |
|                     |   |   |                         |                        |                               |             |                 |
| <b>1.06.03</b>      | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>   | <b>Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan</b>   |                         | <b>35</b>              | <b>Rp 3.000.000</b>           |             |                 |
| <b>1.06.03.2.01</b> | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal</b> | <b>Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal</b> |                         | <b>6</b>               | <b>Rp 3.000.000</b>           |             |                 |
| 1.06.03.2.01.01     | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah  | Jumlah warga negara migran yang mendapatkan fasilitasi  | Batang                  | 6                      | Rp 3.000.000                  | DAU         |                 |
|                     | <b>Total Pagu</b>   |   |                         |                        | <b>Rp 9.248.868.767</b>       |             |                 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 yang mengacu pada Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Renja sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya adalah bahwa ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan karena menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga penurunan nilai nominal berbagai bantuan dari pusat.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan , sebagai berikut :
  - a. Pencapaian Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2023 diselaraskan dengan RPD tahun 2023 – 2026..
  - b. Untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan berpedoman kepada Renja Tahun 2023 dan RPD Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026.
  - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Sosial untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2023.
- 3) Rencana Tidak Lanjut  
Rencana Tidak lanjut Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kinerja Dinas Sosial. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta disiplin dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Selain itu pula Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga perolehan peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga dengan keberadaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya RPD tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Batang serta memberikan manfaat perencanaan pembangunan selanjutnya.

Batang ,        Juni 2023

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Batang



**Ir. Joko Tetuko M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP.196306051992031015





## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS SOSIAL

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang Telp. (0285) 392320 Fax. 392320 Batang  
Email : dinsoskabatang@gmail.com // Website: dinsos.batangkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG NOMOR : 050 / 109 / 2023

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebtukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);

21. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024;
- b. menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 sesuai tahapan dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan;
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang; dan
- d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024; dan
- e. berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan Pemangku Kepentingan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Batang  
Pada tanggal: Juni 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BATANG



**Ir. JOKO TETUKO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630605 199203 1 015**

TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Kepala Bapelitbang Kab. Batang;
2. Inspektur Daerah Kab. Batang;
3. Penghimpun Keputusan;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KAB. BATANG  
NOMOR: 050/ 109/2023  
TENTANG ;  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DINAS SOSIAL KAB. BATANG TAHUN 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG TAHUN 2023**

| No. | Kedudukan Dalam Tim  | Kedudukan Dalam Jabatan                                       |
|-----|--|---|
| 1   | Ketua  | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang                          |
| 2   | Sekretaris   | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Batang                      |
| 3   | Pokja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |   |
|     | Ketua  | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
|     | Anggota  | Penyuluh Sosial Ahli Muda                                     |
|     |  | Penyuluh Sosial Muda  |
|     |  | Penyuluh Sosial Pertama                                       |
| 4   | Pokja Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial    |   |
|     | Ketua  | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial    |
|     | Anggota  | Pekerja Sosial Ahli Muda                                      |
|     |  | Pekerja Sosial Muda   |
|     |  | Pekerja Sosial Pertama  |
|     |  | Ahli Pertama Penyuluh Sosial                                  |
| 5   | Pokja Sekretariat  |   |
|     | Ketua  | Perencana Muda  |
|     | Anggota  | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                         |
|     |  | Pengelola Akuntansi   |
|     |  | Staf Administrasi   |

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BATANG  
  
**Ir. JOKO TETUKO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630605 199203 1 015